

Kebijakan Kepala Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Roni¹ Dumadi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2}

Email: roni.umus18@gmail.com¹ dumadi_adi@yahoo.co.id²

Abstrak

Kebijakan merupakan hal penting yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil oleh kepala daerah nantinya berpihak untuk masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kebijakan kepala daerah dan hubungan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat desa dari lima desa di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan jumlah 54 responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kebijakan kepala daerah dengan kesejahteraan masyarakat diperoleh bahwa hasil analisis bernilai positif dan hubungannya kuat. 2) Pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat diperoleh bahwa hasil analisis bernilai positif dan hubungannya sangat kuat. 3) Kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama memiliki nilai positif dan tingkat hubungannya kuat.

Kata Kunci: Kebijakan Kepala Daerah, Pembangunan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Policy is an important thing related to economic development and community welfare, so that the policies taken by regional heads will be in favor of the community. The purpose of this study is to determine the relationship between regional head policies and the relationship between rural economic development and community welfare. The population in this study is a village device located in Bulakamba District, Brebes Regency. The sample used in this study was a village device from five villages in Bulakamba District, Brebes Regency with a total of 54 respondents. In this study, the author used a quantitative research approach method. Quantitative methods can be interpreted as research methods based on the philosophy of positivism, used to examine in certain populations or samples, data collection using research instruments, data analysis is quantitative or statistical, with the aim of testing predetermined hypotheses. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis. Data analysis using the SPSS program. The results of this study showed: 1) The policy of the regional head with the welfare of the community was obtained that the results of the analysis were of positive value and the relationship was strong. 2) The development of the rural economy with the welfare of the people is obtained that the results of the analysis are of positive value and the relationship is very strong. 3) The policies of regional heads and rural economic development with the welfare of the community together have positive values and the level of relationship is strong.

Keywords: Regional Head Policy, Economic Development, and Community Welfare



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah harapan setiap warga masyarakat dalam hidupnya. Sejahtera secara sandang, pangan dan papan. Pada akhirnya, akan tenang kehidupannya,

merasa berharga, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain (Puspitorini, 2012). Secara umum kesejahteraan masyarakat sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial, antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Kesejahteraan rakyat berarti kesejahteraan lahir batin dari rakyat. Hal itu berarti bahwa tidak hanya kesejahteraan fisik saja, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik, akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan non fisiknya, kebutuhan rohaninya juga harus tercukupi. Meski hal itu tidak mudah untuk diraih; butuh perjuangan, kerja keras dan dukungan pemerintah dalam berbagai bidang.

Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan ekonomi nasional akan dapat diwujudkan dengan pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan lapangan pekerjaan serta pemerataan penghasilan bagi seluruh warga masyarakat. Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah. Saat ini, dengan laju perkembangan zaman, justru permasalahan kesejahteraan sosial makin kompleks. Termasuk di Kabupaten Brebes masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, bencana alam serta masalah kesejahteraan sosial lainnya makin rumit. Menghadapi kompleksitas tersebut, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, agar bisa mengimbangi laju pertumbuhan permasalahan sosial yang terus terjadi. Diperlukan upaya penanganan yang menyeluruh dengan menitikberatkan pada peningkatan peran tiga unsur yaitu pemerintah daerah, pembangunan ekonomi pedesaan dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (<https://brebeskab.go.id>).

Terkait dengan gejala dan permasalahan di lingkungan pemerintahan, seorang kepala daerah secara terus-menerus dihadapkan dengan berbagai tuntutan dan tantangan, yang mau tidak mau harus dihadapi, direspons dan ditindaklanjuti, baik secara internal maupun eksternal, sebagai ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi Kepala Daerah (J, 2010). Hal itu karena Kepala Daerah dipandang sebagai komponen penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Masalah utama pembangunan daerah ada pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah) (Nugroho, 2018).

Kepala daerah dengan kebijakan yang dimilikinya berkewajiban membangun desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah pedesaan tersebut. Kepala daerah dituntut berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi kreator, inovator, dan fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat demi masyarakat sejahtera (Sugiman, 2018).

Pembangunan ekonomi pedesaan adalah suatu proses pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat mengelola sumber daya dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk mengembangkan lowongan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Hanly, 2017). Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes mencapai 5,7 % yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional (BPS, 2022).

Pembangunan ekonomi pedesaan tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan, sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan (Fitriasari, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hubungan kebijakan kepala daerah dengan kesejahteraan masyarakat, 2) Bagaimana hubungan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat, 3) Bagaimana hubungan kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yang meliputi: (1) transparansi (keterbukaan), yaitu ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, (2) partisipasi, yaitu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa, (3) dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabilitas*), artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi penyimpangan (4) berkelanjutan (*sustainable*), artinya berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen, dan bukan hanya pada satu waktu saja (Zubaedi, 2013).

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2010). Kebijakan berarti kepandaian menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan secara arif atau bertindak apabila menghadapi kesulitan (Hariri, 2015). Lebih lanjut, kebijaksanaan memuat tiga elemen, yaitu: 1) identifikasi, 2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Pemerintah daerah adalah penyelenggara penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat menurut asas otonomi (Undang-undang, 2014).

Bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang ada (Agustino, 2012). Pada pembangunan ekonomi keberhasilan pembangunan diukur dalam perspektif waktu (mempertimbangkan kepentingan antar generasi) yang dikenal dengan model pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*).

Kebijakan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat, meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah dengan berwawasan lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas nasib rakyatnya. Dengan fungsi-fungsi

yang dimilikinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat merubah nasib masyarakatnya yang dalam hal ini adalah masyarakat lebih baik. Adapun mengenai fungsi dari pemerintahan menurut Rasyid dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*) (Labolo, 2016). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah yang bersifat desentralistis, antara lain: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (Subarsono, 2013).

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan fungsi rendahnya pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. Akan tetapi yang lebih penting adalah dalam menentukan sasaran pembangunan, karena kebijakan ekonomi yang telah berhasil bisa mempengaruhi kebijakan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi (1) kebutuhan hidup; (2) kebutuhan harga diri; (3) kebutuhan kebebasan (Suryana, 2013). pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu (Kartasasmita, 2012).

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (Lesmana, 2014). Pembangunan ekonomi pedesaan akan berdampak besar jika tata kelola bidang yang urgen diperhatikan antara lain: infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadahi, akses informasi, kualitas sumber daya manusia yang unggul, dan pendapatan penduduk (Desa Online, 2022).

Menurut UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima (Suharto, 2015). Konsep kesejahteraan dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*) (Nasikum, 2006). Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang dari bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera (Suharto, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Dengan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi serta semua data dari informasi yang diwujudkan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini untuk mencari hubungan kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini jumlah populasi yang ada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang menjadi objek penelitian adalah perangkat desa. Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan cara *purposive sample* yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan

sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel. Sasaran atau sampel yang dikehendaki yaitu diambil dari perangkat desa dengan usia yang masih produktif dan rata-rata adalah pria dengan keadaan tempat tinggal yang layak huni. Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden diambil lima desa di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes sebagai objek penelitian diantaranya adalah perangkat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 11 responden, perangkat Desa Pulogading, Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 11 responden, perangkat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 11 responden, perangkat Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 11 responden, perangkat Desa Karang Sari Kecamatan Bulakamba dengan responden sejumlah 10 responden.

Instrumen Penelitian

1. Instrumen Kebijakan Kepala Daerah

Skala yang digunakan adalah interval 1–5. Skor 5 digunakan untuk menggambarkan Kebijakan Kepala Daerah yang Sangat Baik (SB), skor 4 menggambarkan Kebijakan Kepala Daerah yang Baik (B), skor 3 menggambarkan Kebijakan Kepala Daerah yang Cukup Baik (CB), skor 2 menggambarkan Kebijakan Kepala Daerah yang Tidak Baik (TB), skor 1 menggambarkan Kebijakan Kepala Daerah yang Sangat Tidak Baik (STB). Adapun kisi-kisi instrumen variabel Kebijakan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Variabel Kebijakan Kepala Daerah

No.	Dimensi	Indikator	Responden
1.	Kebijakan Kepala Daerah	1. Terkendalinya permasalahan sosial, dilihat dari dua dimensi yaitu bobot masalah dan kecenderungan masalah dari waktu ke waktu. 2. Terpenuhinya kebutuhan sosial dilihat dari dimensi jangkauan pelayanan, baik pelayanan pemerintah maupun masyarakat 3. Terbukanya peluang sosial yang dilihat dari dimensi potensi dan sumber sosial yang meliputi tenaga & dana, dan peran aktif masyarakat.	Angket Perangkat Desa

2. Instrumen Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Skala yang digunakan adalah interval 1–5. Skor 5 digunakan untuk menggambarkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan yang Sangat Baik (SB), skor 4 menggambarkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan yang Baik (B), skor 3 menggambarkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan yang Cukup Baik (CB), skor 2 menggambarkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan yang Tidak Baik (TB), skor 1 menggambarkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan yang Sangat Tidak Baik (STB).

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan

No.	Dimensi	Indikator	Responden
1.	Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Pendapatan desa per kapita ketimpangan pendapatan perubahan struktur perekonomian pertumbuhan kesempatan kerja	Angket Perangkat Desa

3. Instrumen Kesejahteraan Masyarakat

Skala yang digunakan adalah interval 1–5. Skor 5 digunakan untuk menggambarkan Kesejahteraan Masyarakat yang Sangat Baik (SB), skor 4 menggambarkan Kesejahteraan Masyarakat yang Baik (B), skor 3 menggambarkan Kesejahteraan Masyarakat yang Cukup

Baik (CB), skor 2 menggambarkan Kesejahteraan Masyarakat yang tidak baik, skor 1 menggambarkan Kesejahteraan Masyarakat Sangat Tidak Baik (STB).

Tabel 3. Kisi-kisi Insstrumen Vvariabel Kesejahteraan Masyarakat

No.	Sub Variabel	Indikator	Responden
1.	Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dan pemerataan pendapatan pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata	Angket Perangkat Desa

Berdasarkan indikator yang ada pada kisi-kisi tersebut selanjutnya disusun angket dengan berpedoman pada cara menyusun angket. Setiap indikator dibuat satu item angket, tetapi ada juga yang dibuat dua item angket atau lebih. Dalam penelitian ini, untuk pengambilan datanya dilakukan dengan cara menggunakan lembar kuesioner. Hal ini dilakukan agar responden lebih bebas dalam menjawab pertanyaan dari penulis. Kuesioner ini dibagikan kepada responden sampel perangkat desa Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kuesioner yang dibagikan pada para responden perangkat desa dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan tertutup yaitu berbentuk pilihan ganda yang berkaitan dengan kebijakan kepala daerah, pembangunan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Alat analisisnya berupa metode statistik dan ekonometrik. Ekonometrik didefinisikan sebagai alat kuantitatif dari fenomena yang sebenarnya yang didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dengan teori dan pengamatan dihubungkan dengan metode inferensi yang sesuai. Penggunaan analisis deskriptif ini ditunjukkan untuk mengetahui hubungan kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat.

Uji validitas penulis akan mengkonsultasikan instrumen dengan faktor-faktor variabel yang bersangkutan. Uji coba secara empirik menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan fasilitas komputer program *Statistical Package for Social Sciences for Windows*. Dasar pengambil keputusan dalam uji validitas sebagai berikut:

1. Apabila nilai r_{hasil} positif serta $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$, maka butir atau variabel tersebut valid.
2. Apabila nilai r_{hasil} negatif dan $r_{\text{hasil}} < r_{\text{tabel}}$ atau pun r_{hasil} negatif $> r_{\text{tabel}}$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan (r_{xy}) lebih besar daripada nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan 5%. Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tadi sudah baik. Instrumen yang baik tidak tendensius mengarahkan untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, reliabel akan menghasilkan data yang benar sesuai dengan kenyataannya, maka beberapa kalipun diambil akan tetap sama. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2017). Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat menghasilkan hasil yang stabil bila dilakukan pengukuran ulang kepada subyek yang sama. Uji reliabilitas menggunakan teknik rumus Alpha dan dibantu fasilitas komputer program *Statistical Package for Social Sciences for Windows*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apabila nilai r_{Alpha} positif dan $r_{\text{Alpha}} > r_{\text{tabel}}$ maka butir atau variabel tersebut Reliabel.
2. Apabila nilai r_{Alpha} negatif dan $r_{\text{Alpha}} < r_{\text{tabel}}$ atau pun r_{Alpha} negatif $> r_{\text{tabel}}$ maka butir atau variabel tersebut tidak Reliabel.

Suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai r_{hitung} lebih besar daripada nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan 5%, Sedangkan tahap pelaksanaan berlangsung setelah semua persyaratan dilengkapi dan semua angket telah dipersiapkan, dan telah ada persetujuan dari pihak lembaga yang diteliti. Setelah angket disebar kemudian dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui normal tidaknya tiap variabel dilakukan Uji normalitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran data dari variabel independen yakni: Kebijakan Kepala Daerah dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dengan variabel dependen Kesejahteraan Masyarakat berdistribusi normal. Alasan dilakukan uji ini adalah karena pemakaian tehnik analisa korelasi yang akan dipergunakan mensyaratkan dipenuhinya ketentuan data dari variabel yang akan diteliti berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam analisis yang menggunakan statistik, distribusi sampel harus mengarah berdistribusi normal.

Peneliti menggunakan analisis korelasi berganda untuk mengetahui besarnya hubungan variabel kebijakan kepala daerah dan variabel pembangunan ekonomi pedesaan dengan variabel dependen kesejahteraan masyarakat. Guna mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, perlu diketahui nilai koefisien determinasi R^2 karena nilai variabel bebas yang diukur terdiri dari nilai rasio *absolute* dan nilai perbandingan, kegunaan dari R^2 adalah: Untuk mengukur besarnya persentase dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan rumus: $KD = R^2 \times 100\%$

Pengujian Hipotesis

Perhitungan atau analisis pada penelitian ini memanfaatkan komputer program *Statistical Package for Social Sciences for Windows*. Statistik uji yang digunakan adalah:

Uji t

Untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) terhadap variabel dependen yakni Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan keputusan uji adalah menggunakan uji parsial. Uji t antara variabel independen dengan variabel dependen menggunakan keputusan uji sebagai berikut:

1. $H_0 : \rho = 0$, Artinya tidak ada hubungan yang nyata dari variabel bebas Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) terhadap variabel dependen yakni Kesejahteraan Masyarakat (Y)
2. $H_0 : \rho \neq 0$, Artinya terdapat hubungan yang nyata dari variabel bebas Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) terhadap variabel dependen yakni Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Uji F (Anova)

Statistik uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel independen dengan variabel dependen yakni Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y). Setelah dilakukan Uji F_{hitung} penulis akan menggunakan keputusan uji berikut ini:

1. H_0 : diterima jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} yakni ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. H_0 : ditolak jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} tidak ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Penelitian dilakukan kepada Perangkat Desa Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan jumlah sampel sebanyak 54 orang. Data diperoleh menggunakan instrumen (kuesioner) yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya meliputi variabel kebijakan kepala daerah, pembangunan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui gambaran umum terhadap tingkat penyebaran jawaban responden dengan variabel Kebijakan Kepala Daerah (X1), Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X2), Kesejahteraan Masyarakat (Y). Uraian hasil perhitungan statistik deskriptif seperti nilai mean, nilai minimum dan maksimum, standar deviasi tersebut akan dikemukakan berikut.

Variabel Kebijakan Kepala Daerah (X1) yang diungkap dengan instrumen sebanyak 10 item pertanyaan. Hasil dari pengolahan data tersebut di gambarkan secara lebih jelas sebagai berikut:

Tabel 4. Deskriptif Statistik Variabel Kebijakan Kepala Daerah (X₁)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Item1	54	1	5	2.89	1.176
Item2	54	1	5	2.98	1.310
Item3	54	1	5	2.61	1.250
Item4	54	1	5	2.98	1.447
Item5	54	1	5	2.72	1.204
Item6	54	1	5	2.65	1.231
Item7	54	1	5	2.78	1.144
Item8	54	1	5	2.78	1.192
Item9	54	1	5	2.87	1.388
Item10	54	1	5	2.80	1.337
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 54 orang responden, pertanyaan perangkat desa item 2 dalam menilai respon masyarakat terhadap Kebijakan Kepala Daerah dalam mengatasi masalah sosial dan item 4 dalam menilai pelayanan pemerintah membantu dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat memiliki jumlah rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 2,98 dengan standar deviasi 1,310. Sedangkan terhadap pertanyaan perangkat desa item 3 dalam menilai Kebijakan Kepala Daerah memberikan solusi untuk peningkatan kebutuhan sosial masyarakat memiliki jumlah rata-rata paling rendah yaitu sebesar 2,61 dengan standar deviasi 1,250.

Variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂) yang diungkap dengan instrumen sebanyak 10 item pertanyaan. Hasil dari pengolahan data tersebut di gambarkan secara lebih jelas sebagai berikut:

Tabel 5. Deskriptif Statistik Variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Item1	54	2	5	3.96	1.027
Item2	54	1	5	3.89	1.127
Item3	54	1	5	3.61	1.352
Item4	54	2	5	3.91	1.202
Item5	54	2	5	3.61	1.071
Item6	54	2	5	3.94	1.140
Item7	54	1	5	3.72	1.280
Item8	54	1	5	3.57	1.253

Item9	54	2	5	3.94	.960
Item10	54	1	5	3.74	1.320
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 54 orang responden, pertanyaan perangkat desa item 1 dalam menilai Pembangunan ekonomi pedesaan dapat meningkatkan pendapatan desa per kapita memiliki jumlah rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 3,96 dengan standar deviasi 1,027. Sedangkan terhadap pertanyaan perangkat desa item 8 dalam menilai Masyarakat Kecamatan Bulakamba hendaknya selalu mencari informasi mengenai potensi ekonomi yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang lebih baik memiliki jumlah rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,57 dengan standar deviasi 1,253.

Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) yang diungkap dengan instrumen sebanyak 10 item pertanyaan. Hasil dari pengolahan data tersebut di gambarkan secara lebih jelas sebagai berikut :

Tabel 6. Deskriptif Statistik Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Item1	54	1	5	3.07	1.061
Item2	54	1	5	3.22	1.341
Item3	54	1	5	3.13	1.318
Item4	54	1	5	3.27	1.291
Item5	54	1	5	3.20	1.323
Item6	54	1	5	3.04	1.373
Item7	54	1	5	3.07	1.286
Item8	54	1	5	3.07	1.257
Item9	54	1	5	3.26	1.403
Item10	54	1	5	3.26	1.348
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 54 orang responden, pertanyaan perangkat desa item 4 dalam menilai Pendidikan formal yang tinggi dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bulakamba memiliki jumlah rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 3,27 dengan standar deviasi 1,291. Sedangkan terhadap pertanyaan perangkat desa item 6 dalam menilai Kepala Daerah telah memberikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bulakamba memiliki jumlah rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,04 dengan standar deviasi 1,373.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Guna mengetahui hasil analisis dari variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) menggunakan Komputer program SPSS Versi 16 for Windows input data variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) yang merupakan data ordinal dari sampel berjumlah 10 Try Out (N=10) jumlah soal sebanyak 10 pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Validitas Variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	25.17	87.160	.667	.934

Item2	25.07	82.976	.775	.929
Item3	25.44	84.855	.728	.931
Item4	25.07	82.070	.726	.932
Item5	25.33	84.755	.766	.930
Item6	25.41	84.397	.764	.930
Item7	25.28	85.827	.757	.930
Item8	25.28	84.242	.801	.928
Item9	25.19	81.173	.803	.928
Item10	25.26	84.196	.701	.933

Sumber: Hasil olah data

Dengan $df = N - 1$ atau $df = 10 - 1 = 9$ dan tingkat signifikan 5% maka diperoleh nilai r_{tabel} 0,666. Sehingga untuk melihat r_{hasil} dilihat pada tabel Uji validitas variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1). Oleh karena hasilnya positif dan lebih besar dari r_{tabel} 0,666 maka variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dinyatakan valid yakni pertanyaan pertama sebesar 0,667, pertanyaan kedua sebesar 0,775, pertanyaan ketiga sebesar 0,728, pertanyaan keempat sebesar 0,726, pertanyaan kelima sebesar 0,766, pertanyaan keenam sebesar 0,764, pertanyaan ketujuh sebesar 0,757, pertanyaan kedelapan sebesar 0,801, pertanyaan kesembilan sebesar 0,803, pertanyaan kesepuluh sebesar 0,701. Dimana secara keseluruhan dinyatakan valid atau sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya nilai r_{hasil} positif dan lebih besar dari r_{tabel} dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji Validitas (X_1)

Pertanyaan	Kebijakan Kepala Daerah (X_1)		
	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,667	0,666	Valid
2	0,775		
3	0,728		
4	0,726		
5	0,766		
6	0,764		
7	0,757		
8	0,801		
9	0,803		
10	0,701		

Sumber: Hasil olah data

Uji Reliabilitas variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan nilai r_{tabel} 0,666 sedangkan nilai Alpha 0,937 sehingga dapat disimpulkan bahwa Alpha positif dan lebih besar atau $0,937 > 0,666$ maka instrumen penelitian variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) adalah **Reliabel**. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	10

Untuk mengetahui hasil analisis variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan menggunakan Komputer program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows input* data variable Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) yang merupakan data ordinal dari sampel berjumlah 10 *Try Out* ($N = 10$) dengan jumlah soal sebanyak 10 pertanyaan, setelah itu dilakukan analisis yang sesuai dengan analisis dalam metodologi penelitian sehingga

menghasilkan output untuk variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel (X_2)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	28.52	99.009	.788	.945
Item2	28.37	95.030	.763	.945
Item3	28.46	94.102	.819	.943
Item4	28.33	95.208	.790	.944
Item5	28.39	94.393	.803	.943
Item6	28.56	93.082	.823	.942
Item7	28.52	96.330	.744	.946
Item8	28.52	96.066	.777	.945
Item9	28.33	92.566	.824	.942
Item10	28.33	95.396	.743	.946

Sumber: Hasil olah data

Dengan $df = N - 1$ atau $df = 10 - 1 = 9$ dan tingkat signifikan 5% maka peroleh nilai r_{tabel} 0,666. Sehingga untuk melihat r_{hasil} dapat dilihat pada tabel uji validitas Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2), oleh karena hasilnya positif dan lebih besar dari r_{tabel} 0,666, maka variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) yakni pertanyaan pertama sebesar 0,788, pertanyaan kedua sebesar 0,763, pertanyaan ketiga sebesar 0,819, pertanyaan keempat sebesar 0,790, pertanyaan kelima sebesar 0,803, pertanyaan keenam sebesar 0,823, pertanyaan ketujuh sebesar 0,744, pertanyaan kedelapan 0,777, pertanyaan kesembilan sebesar 0,824, pertanyaan kesepuluh sebesar 0,743. Dimana secara keseluruhan dapat dinyatakan valid atau sebesar 100 % valid. Untuk lebih jelasnya nilai r_{hasil} positif dan lebih besar dari r_{tabel} dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas (X_2)

Pertanyaan	Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2)		
	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,788	0,666	Valid
2	0,763		
3	0,819		
4	0,790		
5	0,803		
6	0,823		
7	0,744		
8	0,777		
9	0,824		
10	0,743		

Sumber: Hasil olah data

Uji Reliabilitas variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan Nilai r_{tabel} 0,666 sedangkan nilai Alpha 0,949 sehingga dapat disimpulkan bahwa Alpha positif dan lebih besar atau $0,949 > 0,666$ maka instrumen variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) adalah **Reliabel**. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel (X_2)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.949	10

Guna mengetahui hasil analisis dari variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) menggunakan Komputer program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 16 for Windows* input data variabel Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan data ordinal dari sampel berjumlah 10 *Try Out* (N =10) dengan jumlah soal sebanyak 10 pernyataan sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Uji Validitas (Y)
Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	35.10	107.878	.906	.961
Item2	34.80	107.733	.822	.964
Item3	34.90	116.767	.692	.969
Item4	35.30	108.456	.808	.964
Item5	35.10	104.989	.887	.962
Item6	34.80	103.956	.856	.963
Item7	34.30	109.122	.938	.961
Item8	34.60	102.933	.844	.964
Item9	34.60	102.267	.920	.960
Item10	34.80	103.733	.864	.963

Sumber: Hasil olah data

Dengan $df = N - 1$ atau $df 10 - 1 = 9$ dan tingkat signifikan 5% maka diperoleh nilai r_{tabel} 0,666. Sehingga untuk melihat r_{hasil} dapat dilihat pada tabel uji validitas variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y), dimana didapatkan nilai r_{hasil} positif dan lebih besar dari r_{tabel} (0,666) maka variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat dinyatakan valid yakni pertanyaan pertama 0,906, pertanyaan kedua sebesar 0,822, pertanyaan ketiga sebesar 0,692, pertanyaan keempat sebesar 0,808, pertanyaan kelima 0,887, pertanyaan keenam sebesar 0,856, pertanyaan ketujuh sebesar 0,938, pertanyaan kedelapan sebesar 0,844, pertanyaan kesembilan sebesar 0,920, pertanyaan kesepuluh sebesar 0,864. Sehingga ditinjau dari keseluruhan yang dinyatakan valid atau 100%. Untuk lebih jelasnya nilai r_{hasil} positif dan lebih besar dari r_{tabel} dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 14. Uji Validitas (Y)

Pertanyaan	Kesejahteraan Masyarakat (Y)		
	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,906	0,666	Valid
2	0,822		
3	0,629		
4	0,808		
5	0,887		
6	0,856		
7	0,938		
8	0,844		
9	0,920		
10	0,864		

Sumber: Hasil olah data

Uji Reliabilitas variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan nilai r_{tabel} 0,666, sedangkan pada nilai Alpha sebesar 0,967 sehingga dapat disimpulkan bahwa r_{Alpha} positif dan lebih besar atau $0,967 > 0,666$ maka dengan demikian instrumen penelitian variabel Kesejahteraan

Masyarakat (Y) adalah **Reliabel**. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Tabel 15. Uji Reliabilitas Variabel (Y)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.967	10

Berdasarkan hasil Uji Validitas dan Reliabilitas masing-masing variabel independen (X_1 , dan X_2) dan variabel dependen (Y) terdapat pada tabel uji validitas yang ada, baik pertanyaan/ Pernyataan yang valid maupun yang tidak valid dijelaskan dalam tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 16. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Keterangan	Kebijakan Kepala Daerah (X_1)	Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2)	Kesejahteraan Masyarakat (Y)
Pertanyaan Awal	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pertanyaan Yang Gugur (Tidak Valid)	-	-	-
Pertanyaan Yang Valid	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Alpha	0,937	0,949	0,967

Sumber : Data diolah

Analisis Data Statistik

Untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya data-data dari variabel independen (X_1 dan X_2) serta variabel dependen (Y) yang ada dalam penelitian ini, dilakukan Uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan Chi kuadrat (X^2) dengan menggunakan Komputer program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows* diperoleh hasil berikut ini :

Tabel 17. Hasil Analisis Chi Square Test Statistics

	Kebijakan Kepala Daerah	Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Kesejahteraan Masyarakat
Chi-Square	13.222 ^a	24.222 ^a	30.333 ^b
Df	32	32	22
Asymp. Sig.	.999	.836	.111

a. 33 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,6.

b. 23 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,3.

Hasil uji normalitas variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1), diperoleh nilai X^2_{hitung} sebesar 13.222, sedangkan nilai X^2_{tabel} pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = 32 adalah sebesar 46,194 (X^2_{tabel} terlampir). Dengan demikian X^2_{hitung} lebih kecil dari pada X^2_{tabel} . Hal ini berarti frekuensi skor/data hasil observasi untuk variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1), berdistribusi normal atau tidak menyimpang dari frekuensi yang diharapkan.

Hasil uji normalitas variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) diperoleh nilai X^2_{hitung} sebesar 24,222 sedangkan nilai X^2_{tabel} pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = 32 adalah sebesar 46,194 (X^2_{tabel} terlampir). Dengan demikian X^2_{hitung} lebih kecil daripada X^2_{tabel} . Hal ini berarti frekuensi skor/data hasil observasi untuk variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) berdistribusi normal atau tidak menyimpang dari frekuensi yang

diharapkan.

Pada uji normalitas variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y), diperoleh nilai X^2_{hitung} sebesar 30,333, sedangkan nilai X^2_{tabel} pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = 22 adalah sebesar 33,924 (X^2_{tabel} terlampaui). Dengan demikian X^2_{hitung} lebih kecil daripada X^2_{tabel} . Hal ini berarti frekuensi skor/data hasil observasi untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) berdistribusi normal atau tidak menyimpang dari frekuensi yang diharapkan.

Analisis Uji Hipotesis

Pertama-tama hipotesis penelitian dilakukan untuk masing-masing faktor secara berturut-turut, hipotesis mengenai variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y), hipotesis variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan Kesejahteraan Masyarakat, hipotesis variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan (X_2) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y). Hipotesis penelitian pertama yang akan diuji adalah :diduga ada hubungan positif dan signifikan antara variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut

Tabel 18. Deskriptive Statistics Hubungan (X_1) dengan (Y)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	54	11	46	28.06	10.158
Y	54	16	50	37.91	9.485
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang tampak pada tabel menunjukkan bahwa dari jumlah 54 orang responden, skor rata-rata variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) sebesar 28,06 dengan standar deviasi 10,158 sedangkan skor rata-rata variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) 37,91 dengan standar deviasi 9,485. Untuk melihat besarnya korelasi hubungan Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) dilakukan uji korelasi dari signifikansi sebagai berikut:

Tabel 19. Korelasi Parsial (X_1) dengan (Y)
Correlations

		Kebijakan Kepala Daerah	Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan Kepala Daerah	Pearson Correlation	1	.746**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	54	54
Kesejahteraan Masyarakat	Pearson Correlation	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	54	54
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Sumber: Hasil olah data

Hasil perhitungan korelasi yang menunjukkan bahwa terdapat Hubungan Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y), dari tabel di atas besarnya koefisien korelasi adalah 0,746 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Interpretasi ini diperkuat dengan tingkat signifikansi 0,000, maka hubungan antara Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) kuat.

Hipotesis penelitian kedua yang akan diuji adalah: diduga ada hubungan positif dan signifikan antara variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Deskriptive Statistics Hubungan (X₂) dengan (Y)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₂	54	10	49	31.59	10.806
Y	54	16	50	37.91	9.485
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang tampak pada tabel menunjukkan bahwa dari jumlah 54 orang responden, skor rata-rata variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂) sebesar 31,59 dengan standar deviasi 10,806 sedangkan skor rata-rata variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) 37,91 dengan standar deviasi 9,485.

Untuk melihat besarnya korelasi hubungan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₁) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) dilakukan uji korelasi dari signifikansi sebagai berikut

Tabel 21. Korelasi Parsial (X₂) dengan (Y)
Correlations

		Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Kesejahteraan Masyarakat
X ₂	Pearson Correlation	1	.831**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	54	54
Y	Pearson Correlation	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olah data

Hasil perhitungan korelasi yang menunjukkan bahwa terdapat Hubungan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y), dari tabel di atas besarnya koefisien korelasi adalah 0,831 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Interpretasi ini diperkuat dengan tingkat signifikansi 0,000, maka hubungan antara Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X₂) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y) sangat kuat.

Tujuan analisis koefisien korelasi berganda dimaksud untuk mengetahui tingkat signifikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yakni variabel (Y) benar secara simultan (bersama-sama) dengan menggunakan komputer program *Statistical Package for Social Sciences for Windows* adapun hasilnya lihat tabel model Summary sebagai berikut:

Tabel 22. Analisis Koefisien Korelasi Secara Bersama-sama
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 ^a	.738	.728	4.947	2.289

a. Predictors: (Constant), Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Kebijakan Kepala Daerah

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas yakni *model Summary* yang menghasilkan nilai R sebesar 0,859. Koefisien determinasinya adalah $R^2 = (0,859)^2 = 0,738$ atau 73,8 % berarti bahwa 73,8% dapat dinyatakan dengan hasil analisa secara bersama-sama variabel independen Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan variabel dependen Kesejahteraan Masyarakat (Y) memiliki nilai positif dan tingkat hubungannya kuat, jadi kedua variabel independen tersebut mempunyai hubungan dengan variabel dependen Kesejahteraan Masyarakat sebesar 73,8% di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Adapun untuk menentukan tinggi rendahnya pengaruh antara variabel-variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23. Nilai Koefisien Korelasi Dan Interpretasi

Koefisien Korelasi	Interpretasi
0,000 - 0,199	Sangat Rendah
0,200 - 0,399	Rendah
0,400 - 0,599	Sedang
0,600 - 0,799	Kuat
0,800 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017)

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) secara parsial mempunyai hubungan bermakna terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dilakukan pengujian t_{hitung} dan t_{tabel} . Untuk Uji t ini penulis melakukan dengan cara membandingkan antara hasil t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu memiliki nilai masing-masing sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil Uji t

Variabel	Nilai	Standard Error	t_{hitung}	t_{tabel}
Kebijakan Kepala Daerah (X_1)	0,292	0,095	3,064	1,680
Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2)	0,533	0,090	5,949	1,680

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil uji t tersebut di atas, bahwa secara nyata variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dimana nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak H_a diterima. Sedangkan variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y), dimana nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , secara nyata tidak mempunyai hubungan dengan variabel Kinerja Guru (Y) dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_0 diterima H_a ditolak. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diperoleh dengan nilai t_{hitung} sebesar $= 3,064 > t_{0,05 (52)} = 1,680$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti mempunyai cukup bukti bahwa antara variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) ada hubungan yang signifikan. Dari hasil uji hipotesis variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) yang diperoleh yakni nilai $t_{hitung} = 5,949 > t_{0,05 (52)} = 1,680$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti mempunyai bukti, bahwa antara variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) terdapat hubungan yang nyata atau tidak signifikan. Dari hasil uji t tersebut di atas bahwa hipotesis yang diajukan pada bab terdahulu ternyata mempunyai bukti kebenarannya.

Adapun hasil dari uji F_{hitung} (Anova) dengan menggunakan Komputer program *Statistical Package for Social Sciences for windows* yakni uji ANOVA, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 25. Hasil Uji F anova^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3520.577	2	1760.288	71.937	.000 ^a
	Residual	1247.961	51	24.470		
	Total	4768.537	53			

a. Predictors: (Constant), Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Kebijakan Kepala Daerah

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil olah data

Dari hasil analisis dengan menggunakan Komputer program *Statistical Package for Social Sciences for windows* yakni uji Anova atau F_{test} atau F_{hitung} di dapat nilai sebesar 71,937 dimana lebih besar dari $F_{tabel(53)}$ sebesar 3,178 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 karena $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, pada bab ini akan diketengahkan kesimpulan dan saran yang bersifat sintetik dan sistemik. Kesimpulan yang rumusannya bersifat umum yang merupakan dasar bagi pengkajian selanjutnya berupa implikasi dan saran penelitian sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi parsial variabel Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dengan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) diperoleh nilai sebesar sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis bernilai positif dan hubungannya kuat. Hasil analisis koefisien korelasi parsial antara variabel Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) diperoleh nilai sebesar sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis bernilai positif dan hubungannya sangat kuat Sedangkan secara bersama-sama dapat dinyatakan dengan hasil analisa secara bersama-sama variabel independen Kebijakan Kepala Daerah (X_1) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (X_2) dengan variabel dependen Kesejahteraan Masyarakat (Y) memiliki nilai positif dan tingkat hubungannya kuat, jadi kedua variabel independen tersebut mempunyai hubungan dengan variabel dependen Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, pada bab ini akan diketengahkan kesimpulan dan saran yang bersifat sintetik dan sistemik. Kesimpulan yang rumusannya bersifat umum yang merupakan dasar bagi pengkajian selanjutnya berupa implikasi dan saran penelitian sebagai berikut: Karena ada hubungan kebijakan kepala daerah maka kami menyarankan sebaiknya kebijakan tersebut patut di pertahankan dan di tingkatkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya di kecamatan Bulakamba. Karena ada hubungan antara pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat maka hendaknya pembangunan ekonomi harus di prioritaskan demi kesejahteraan masyarakat Kebijakan kepala daerah dan pembangunan ekonomi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat maka dari keduanya harus saling menopang untuk kelanjutan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Desa Online. (2022, Juli 2). Retrieved from https://desaonline.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/22426

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BPS. (2022). *Brebes dalam Angka*. Brebee.
- Fitriasari, D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Tahun 2011-2014 Di Kabupaten Pati). *Repository IAIN Kudus*.
- Hanly, S. (2017). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 3*.
- Hariri, I. S. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <https://brebeskab.go.id>. (n.d.). Diakses 14 Juni 2021, pp. <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/permasalahan-sosial-makin-kompleks-psm-jangan-kendur-berbakti>.
- J, K. (2010). *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasasmita, K. (2012). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Ilmu Administrasi.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Labolo, M. (2016). *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lesmana, I. (2014). *Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*. Kutai Kartanegara Barat.
- Mangkoesebroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasikum. (2006). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Nugroho, F. I. (2018). Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 33, No. 1*, 29-39.
- Puspitorini. (2012). *Tingkah Laku Proposial dan Kebahagiaaan*. Unika Soegijapranata.
- Subarsono. (2013). *Aanalisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1*, 82-95.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, E. (2015). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Pertama.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M. d. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang. (2014). *UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wahab, S. A. (2010). *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aaksara.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group.